

**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri)**

**Murdiana Asih Heningtyas, Sjamsiar Sjamsuddin, Minto Hadi**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: [muryumi@ymail.com](mailto:muryumi@ymail.com)

**Abstract:** *Role of enment and Community Development Efforts in Nonformal Education (Case Study: The existence of "Kampung Inggris" district of Kediri). Nonformal education as part of the educational system have the same duties with other education namely, providing the best service to the community. The procurement of nonformal education activities tend to be more organised by community supported by the Government. This research highlights the role of Government and the community in an effort the development of nonformal education in the Kampung Inggris, Kediri District. Kampung Inggris is a region consisting of 131 Institute courses, as the application of the nonformal education. The fact that more people play an active role in the implementation of the provision of educational services in the Kampung Inggris. Besides communities facilitate migrants by providing a wide range of needs, such as making the business opportunities for the local community that can improve the economy. The role of Government more into a driving force of the roles that society has been implemented.*

**Keywords:** *Nonformal Education, Kampung Inggris, government, community*

**Abstrak:** *Peran Pemerintah dn Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri). Pendidikan Nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pengadaan kegiatan pendidikan nonformal cenderung lebih diadakan oleh masyarakat dengan didukung oleh pemerintah. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris, Kabupaten Kediri. Kampung Inggris merupakan wilayah yang terdiri dari 131 lembaga kursus, sebagai penerapan dari jalur pendidikan nonformal. Faktanya masyarakat lebih berperan aktif dalam pelaksanaan penyediaan pelayanan pendidikan di Kampung Inggris. Selain itu masyarakat memfasilitasi para pendatang dengan menyediakan berbagai kebutuhan, hal tersebut sekaligus menjadikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan taraf ekonominya. Peran pemerintah lebih menjadi pendorong dari peran yang telah dilaksanakan masyarakat.*

**Kata kunci:** *Kampung Inggris, pendidikan nonformal, pemerintah, masyarakat*

---

## **Pendahuluan**

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah pancasila dengan berusaha untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan. Pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem

pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Di Indonesia pendidikan nonformal sudah tumbuh di tengah masyarakat sejak sebelum kemerdekaan. Kampung Inggris terletak di Desa Tulungrejo dan Desa Pelem merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan nonformal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Bahasa Inggris. Masyarakat telah menyediakan lebih dari 100 lembaga kursus Bahasa Inggris. Siswa yang datang berkunjung berasal dari berbagai penjuru sehingga Kampung Inggris Pare dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Bahkan tidak sedikit pula pelajar yang berasal

dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Timor Leste, dan Libya. Dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kampung Inggris terus berkembang pesat. Dengan melihat kondisi saat ini penulis ingin menyoroti peran aktor yang terkait didalamnya, khususnya masyarakat dan pemerintah.

## Tinjauan pustaka

### 1. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah hal wajib yang harus dilakukan setiap wilayah baik wilayah maju maupun wilayah tertinggal di Indonesia, sesuai dengan Suryono (2010, h.3) pembangunan yaitu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan Siagian (1979, h.3) berpendapat pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Bryan and White dalam Suryono (2004, h.35) mengemukakan Implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*Sustainability*).
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*Interdependence*).

Suryono (2004, h.81-83) menuliskan ada 4 paradigma pembangunan, yaitu:

- a. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)  
Konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan azas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utamanya dari paradigma pertumbuhan adalah penciptaan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik.

- b. Paradigma pembangunan pertumbuhan dan pemerataan (*Growth and equity strategy development*)

Strategi ini lebih diorientasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Namun dengan diterapkannya strategi pertumbuhan dan pemerataan ini, ternyata masih menciptakan ketergantungan suatu negara lain.

- c. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan  
Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/nonrenewable*. Dengan demikian pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai akan kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

- d. Paradigma *Human Development*  
Paradigma *Human Development* yaitu pendekatan pembangunan yang mem perhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elite penguasa. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya secara maksimal.

### 2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995, h.18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

- a. Pertama peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
- b. Kedua timbul pengertian tentang *sevice state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
- c. Ketiga peranan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

Meskipun masyarakat memiliki peran kuat dalam pembangunan pendidikan nonformal Kampung Inggris, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan, menurut Munir (2010, h.19) peran pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu:

a. *Entrepreneur*

Artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

b. Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional*, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.

Siagian (1979, h.101-105) mengklasifikasikan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut:

a. Fungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan (*Maintenance of peace and order*)

Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting oleh karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan ada apabila pemerintah tidak berhasil dalam melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja.

b. Fungsi pertahanan dan keamanan

Fungsi ini merupakan fungsi terpenting pula dari pemerintah karena tidak jarang terlihat adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dengan tujuan agar pihak lain itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat.

c. Fungsi Perpajakan

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di negara politik, tujuannya adalah bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah, pemerintah selalu membutuhkan biaya dan biaya itu secara tradisional bersumber dari pajak.

d. Fungsi Hukum

Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengatur tata benegara dan tata bermasyarakat agar konflik-konflik yang terjadi dalam pembangunan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat, karena mereka

penguasa dan masyarakat akan berkedudukan sama dimata hukum.

e. Fungsi Administratif

Dalam fungsi ini pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berusaha melalui pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Poerbakawatja (1981, h.139) partisipasi diartikan sebagai suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang materiil serta dalam bidang pembangunan.

Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap seringkali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka. Sukardi (2009, h.44) menyatakan bahwa hak warga hanya menjadi kenyataan, apabila mereka dilibatkan secara langsung didalam proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### 4. Teori Governance

Secara singkat pengertian *governance* menurut Mardiasmo (2002, h.24) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Sedangkan Sedarmayanti (2004, h.2) menyatakan bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi-interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Ananto Basuki dan Sofyan (2006, h.15) mengatakan *Good Governance* merupakan upaya untuk merubah watak pemerintah (*Government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Sistem penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan *good governance* masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek yang ingin dicetak sebagaimana keinginan pemerintah. Masyarakat menjadi

subyek yang turut mewarnai program-program kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* hanya akan tumbuh pada pemerintah yang mempraktekan demokrasi. Menurut Mustopadijaja sebagaimana yang dikutip dalam Sjamsuddin (2005, h.63) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* yaitu: prinsip demokrasi dan pemberdayaan, prinsip pelayanan, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip partisipasi, prinsip kemitraan, prinsip desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

## 5. Pendidikan

Secara umum pendidikan mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jenis pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada tujuan bangsa dalam rangka mencerdaskan bangsa yaitu: jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, jalur pendidikan informal.

Pendidikan nonformal telah dijabarkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 adanya Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan nonformal) bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke

tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

## Metode penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan non-formal di Kampung Inggris Kabupaten Kediri. Dengan fokus penelitian: 1. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan non formal di Kampung Inggris 2. Dampak yang dihasilkan dari adanya pengembangan pendidikan non formal di Kampung Inggris 3. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pengembangan pendidikan di Kampung Inggris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris

Peran pemerintah di Kampung Inggris adalah sebagai berikut: peran legalitas dan fungsi hukum, peran pembinaan, peran fasilitator, peran pemasaran dan promosi, peran keamanan dan ketertiban. Faktanya peran pemerintah masih dilaksanakan secara umum, belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris. Peran tersebut terlihat pasif lebih cenderung untuk mendorong usaha yang telah dilaksanakan masyarakat dalam mengembangkan wilayah Kampung Inggris.

Partisipasi masyarakat lebih mendominasi terbukti dari awal pembangunan Kampung Inggris dipegang oleh masyarakat sendiri, berbagai program telah direncanakan dan dibuat oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan disana. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan yaitu: (1) masyarakat pengelola lembaga (2) masyarakat biasa. Berikut adalah bukti partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan non formal di Kampung Inggris: (1) masyarakat pengelola lembaga: (a) mendirikan lembaga kursus dengan menggunakan strategi mengadakan program belajar dengan liburan, belajar melalui english camp area, mendatangkan tutor bule; (b) pertanggungjawaban kepada Desa melalui memberikan

pendidikan bahasa Inggris kepada warga setempat secara gratis, kepedulian kepada pedagang kaki lima di Kampung Inggris dengan cara pemberian bantuan pinjaman modal, pemberian pembelajaran bahasa Inggris kepada pedagang kaki lima secara gratis, pemberian kaos FKB; (c) menjalin kemitraan dengan pihak ketiga (pemilik modal). (2) masyarakat biasa: (a) penyediaan fasilitas kos; (b) penyediaan fasilitas transportasi khusus meliputi rental ojek, rental mobil, serta sepeda; (c) menjaga keamanan dan ketertiban desa.

## 2. Dampak yang dihasilkan dari adanya pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris

Dampak Pengembangan Pendidikan Non-Formal di Kampung Inggris dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya sebagai berikut:

- a. Segi pendidikan  
Meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa Inggris dengan metode mengajar yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Manfaatnya juga dapat dirasakan dilingkungannya seperti memperlancar penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya, meningkatkan nilai dijalur pendidikan formal yang sedang ditempuh, menambah point ketika akan melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan karena adanya sertifikat resmi yang dikeluarkan.
- b. Segi sosial  
Perubahan sosial yang terjadi lebih mengarah pada modernisasi disebabkan banyaknya

nya pendatang yang tinggal di Kampung Inggris. Dampaknya dapat mengarah pada kemajuan (*progress*) yaitu masuknya bahasa Inggris yang telah diajarkan kepada penduduk setempat, masuknya teknologi dan penguasaan teknologi yang menyebabkan desa dapat mengejar ketertinggalan. Sedangkan dampak *regress* ditunjukkan dengan pudarnya suasana kekeluargaan yang tertanam sejak dulu karena banyaknya pendatang yang dirasa asing, adanya sifat bersaing untuk mendapatkan konsumen, adat istiadat yang mulai pudar.

### c. Segi Ekonomi

Dampak dari segi ekonomi tidak perlu diragukan lagi, terbukti dengan adanya Kampung Inggris taraf ekonomi penduduk setempat meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia yang disediakan oleh lembaga kursus, banyaknya kesempatan usaha yang dilakukan oleh penduduk mengingat banyaknya pendatang yang pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan.

## Kesimpulan

Peran masyarakat lebih mendominasi dalam pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris, pemerintah lebih bersifat pasif dengan lebih mendukung dan menjadi fasilitator dengan yang dikehendaki oleh masyarakat di Kampung Inggris. Kampung Inggris membawa dampak terlebih pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat.

---

## Daftar pustaka

- Basuki, Ananto dan Shofyan (2006) **Penguatan Pemerintahan Desa berbasis Good Governance**. Malang, SPOD.
- Mardiasmo (2003) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Andi.
- Munir, Fuady. (2010) **Konsep Negara Demokrasi**. Bandung, Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah RI No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Poerbakawatja, Soegarda. (1981) **Ensiklopedia Pendidikan**. Jakarta, Gunung Agung.
- Sedarmayanti (2004) **Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance Edisi II**. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang. (1979) **Administrasi Pembangunan**. Jakarta, Gunung Agung.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. (2005) **Kepemerintahan & Kemitraan**. Malang, Agritek YPN Malang.
- Sukardi, Akhmad. (2009) **Participatory Governance**. Yogyakarta, Leksbang PRESSindo Yogyakarta.
- Suryono, Agus. (2004) **Pengantar Teori Pembangunan**. Malang, Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. (2010) **Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan**. Malang, UB Press Malang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.